

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16
TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA
LOK BANGKAI KECAMATAN BANJANG
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik



OLEH :

HELWATIN NAJWA

NPM: 2022185

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINITRASI (STIA)

AMUNTAI

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama

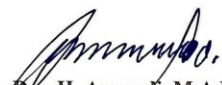
Nama : HELWATIN NAJWA
NPM : 2022185
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013
Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Lok Bangkai
Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing skripsi pada program studi administrasi publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, April 2026

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Drs. H. Arpandi, M.A.P.
NUPTK. 8553741642130083


Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A.
NUPTK. 2436770671130263

Ketua Program Studi Administrasi Publik


Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A.
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Khususnya, rasa syukur yang tak terhingga penulis sampaikan atas nikmat kesehatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA LOK BANGKAI KECAMATAN BANJANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA “**. Dalam proses penyusunan Proposal skripsi ini banyak sekali sumbangan pikiran yang penulis dapatkan dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP., CIQaR., CIQnR Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Drs. H. Arpandi, M.AP Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A. Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak /Ibu Kepala Desa Lok Bangkai yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
5. Bapak petugas pengelolaan sampah di Desa Lok Bangkai yang memberikan informasi kepada penulis untuk kelancaran penelitian,

6. Bapak / Ibu masyarakat Desa Lok Bangkai yang memberikan informasi kepada penulis untuk kelancaran penelitian
7. Bapak Plt Kabid Pengelolaan sampah beserta staf Dinas Perumahan, kawasan pemukiman dan lingkungan hidup
8. Seluruh Dosen beserta Staf Tata Usaha beserta jajarannya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai (STIA).
9. Seluruh keluarga terutama orang tua penulis dan teman-teman memberikan semangat dan dorongan moral atau material yang diberikan.
10. Semua pihak terkait yang turut memberikan saran dan pendapatnya, sehingga bermanfaat bagi penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir proposal skripsi ini sehingga dapat selesai tepat waktunya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan baik itu dari segi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, pengalaman, maupun materi yang didapat. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya pendapat, saran serta bimbingan dari pihak, kiranya dapat memberikan masukan untuk pengembangan penulis selanjutnya. Semoga segala bantuan, bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Amuntai, Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan penelitian	6
E. Manfaat penelitian	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	7
B. Tinjauan Teoritis.....	9
C. Kerangka Pemikiran	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	23
B. Pendekatan Penelitian	23
C. Tipe Penelitian	24
D. Data dan Sumber Data	25
E. Desain Operasional Penelitian	27

F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
G. Teknik Analisa Data	30
H. Uji Kredibilitas	32

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3 Tabel Informan	27
Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	22
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu persoalan lingkungan yang paling sering dihadapi adalah masalah pengelolaan sampah. Sampah merupakan material sisa hasil aktivitas yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu dalam industri maupun rumah tangga. Pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta perkembangan wilayah permukiman yang semakin pesat menyebabkan peningkatan volume sampah setiap tahunnya. Jika tidak dikelola secara baik dan berkelanjutan, sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas estetika lingkungan, serta berpotensi menimbulkan bencana seperti banjir.

Secara umum, pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kebijakan ini mendelegasikan kewenangan pengelolaan sampah ke pemerintah daerah melalui otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022).

Di tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagai landasan hukum utama. Perda ini mengatur pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemanfaatan sampah secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan, dengan melibatkan pemerintah desa, masyarakat, dan swasta. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK tahun 2025, jumlah timbulan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 34.784,50 ton per tahun. Namun, tingkat pengelolaan sampah masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari tidak adanya kegiatan pengurangan sampah (0,00%) serta daur ulang yang juga belum berjalan (0,00%). Sementara itu, jumlah sampah yang ditangani hanya sebesar 93,78 ton per tahun atau sekitar 0,27% dari total timbulan sampah. Dengan demikian, total sampah yang terkelola juga hanya mencapai 0,27%. *(sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK tahun 2025, <https://sipsn.kemenlh.go.id/sipsn/public/data/capaian>)* Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum mendapatkan penanganan yang optimal.

Desa Lok Bangkai sebagai salah satu desa di Kecamatan Banjar Kabupaten Hulu Sungai Utara. Secara geografis, desa ini berada di kawasan yang dekat dengan aliran sungai, sehingga pengelolaan sampah menjadi sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan, khususnya terhadap sumber air yang digunakan oleh masyarakat. Secara umum, pengelolaan sampah di Desa Lok Bangkai masih menghadapi berbagai tantangan, dari aspek perilaku masyarakat, sebagian warga masih belum melakukan pemilahan sampah antara

organik dan anorganik di tingkat rumah tangga. Sampah umumnya dikumpulkan dalam satu wadah, kemudian dibuang ke tempat sampah tanpa adanya pemilahan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik masih perlu ditingkatkan, dari sisi sarana dan prasarana, fasilitas pengelolaan sampah di desa ini masih tergolong terbatas. Tempat pembuangan sampah belum memadai, serta sistem pengangkutan sampah belum berjalan secara optimal dan belum terjadwal dengan baik. Meskipun demikian, Desa Lok Bangkai telah memiliki petugas pengelolaan sampah sebanyak 4 orang yang menangani wilayah 8 Rukun Tetangga (RT). Dari jumlah tersebut, 2 orang bertugas sebagai petugas pengangkut atau pemuat sampah, sedangkan 2 orang lainnya berperan sebagai sopir kendaraan pengangkut sampah. Namun, jumlah petugas tersebut dinilai masih belum sebanding dengan luas wilayah dan jumlah RT yang harus dilayani, sehingga berdampak pada belum maksimalnya pelayanan pengangkutan sampah. Keterbatasan ini menyebabkan masih adanya penumpukan sampah di beberapa titik serta keterlambatan dalam proses pengangkutan.

Dalam konteks kebijakan, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum adanya pengawasan.

Adapun fenomena-fenomena yang ditemukan peneliti pada saat observasi awal tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013

Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai berikut:

1. Sistem pemilahan sampah rumah tangga belum berjalan

Sebagian besar masyarakat di Desa Lok Bangkai masih mencampur sampah organik dan anorganik dalam satu wadah di rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pemilahan sampah dari sumbernya belum diterapkan secara optimal.

2. Keterbatasan sarana tempat sampah

Fasilitas tempat sampah di lingkungan desa masih terbatas. Saat ini hanya tersedia satu jenis tempat sampah (tong), tanpa pemisahan jenis sampah. Sehingga masyarakat tidak memiliki fasilitas untuk memisahkan sampah organik dan anorganik.

3. Terjadinya penumpukan sampah pada tempat sampah

Penumpukan sampah sering terjadi pada tempat sampah karena proses pengangkutan sampah yang tidak menentu. Dengan jumlah armada pengangkut yang terbatas, yaitu satu unit kendaraan pengangkut sampah untuk melayani 8 RT, sehingga proses pengangkutan sampah tidak berjalan optimal.

4. Kurangnya sosialisasi mengenai pengelolaan sampah

Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya pemilahan sampah maupun aturan yang terdapat dalam kebijakan pengelolaan sampah karena sosialisasi dari pemerintah masih terbatas.

Melihat fenomena masalah diatas, maka peneliti mengangkat penelitian dengan berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013

Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara “.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, difokuskan pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Maka yang jadi fokus permasalahan dalam penelitian ini menurut George C. Edward III (Joko Pramono 2020:4) yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, agar sejalan dengan Batasan masalah dan agar penelitian ini lebih terarah serta tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dikemukakan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi mahasiswa dan peneliti lain yang tertarik pada studi tentang implementasi kebijakan publik, khususnya tentang Pengelolaan sampah. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep dan teori terkait peningkatan pengelolaan sampah.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan pihak terkait dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah yang ada, serta menjadi pertimbangan bagi instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait pengelolaan sampah ditingkat desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar, serta menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Imam Fitroni (2018) berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Lamongan (Studi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Dinas Lingkungan Hidup)”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah perkotaan di Kabupaten Lamongan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Lamongan belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sinergi dan koordinasi antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Lingkungan Hidup, sehingga program pengelolaan sampah belum terintegrasi dengan baik. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti fasilitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Lamongan meningkatkan kerja sama dengan masyarakat, aktivis lingkungan, dan LSM dalam pengelolaan sampah serta menambah alokasi anggaran untuk

pembangunan infrastruktur persampahan agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Hendra Budiman (2024) berjudul **“Implementasi Pengelolaan Sampah oleh Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai kerangka analisis dalam melihat pelaksanaan pengelolaan sampah oleh bank sampah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus berperan dalam membantu pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengurangi volume sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Bank sampah ini juga melakukan kegiatan pengolahan dan daur ulang sampah menjadi berbagai produk seperti tas, keranjang, dan kerajinan dari bahan plastik maupun kertas. Namun, implementasi program ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bank sampah serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah melalui bank

sampah sangat dipengaruhi oleh dukungan masyarakat, sosialisasi yang efektif, serta penguatan sumber daya dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik menurut Carl Freadrich dalam Joko Pramono (2020:30-31) yang mengatakan bahwa “Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye dalam Siti Marwiyah (2022:12) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)”.

Menurut James E Anderson dalam Anirwan (2025: 27) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah: “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”. (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Menurut David Easton dalam Sahya Anggara (2018:35), “Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society “ (kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat).

Menurut Nurcholis dalam Irawaty Igirisa (2022:32), memberikan definisi tentang kebijakan sebagai keputusan suatu

organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam:

- a. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit organisasi pelaksana kebijakan),
- b. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

b. Jenis Kebijakan Publik

Menurut James Anderson dalam Siti Marwiyah (2022:13-14) menyampaikan bahwa kategori kebijakan publik sebagai berikut:

1) Kebijakan *substantif* dan kebijakan *procedural*

Kebijakan substantif merupakan kebijakan yang menyangkut dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah tersebut. Sedangkan kebijakan prosedural merupakan bagaimana kebijakan dijalankan.

2) Kebijakan *distributive*, kebijakan *regulatori* dan kebijakan *redistributive*

Kebijakan distributif merupakan distribusi pelayanan atau pemanfaatan kepada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

3) Kebijakan material dan kebijakan simbolik

Kebijakan material merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya secara detail pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis merupakan kebijakan yang memberikan manfaat kepada kelompok sasaran.

- 4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan barang privat

Kebijakan barang umum merupakan kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan barang privat merupakan kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

c. Proses kebijakan Publik

Proses kebijakan publik menurut William Dunn (2017) dalam Irawaty Igrisa (2022:35-37), adalah sebagai berikut:

- 1) *Agenda Setting* adalah suatu proses mengupayakan agar suatu masalah publik berubah menjadi agenda kebijakan dan agenda pemerintah. Termasuk didalam hal ini adalah perumusan masalah - memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah;
- 2) *Forecasting* (peramalan) adalah memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dengan diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan;
- 3) Adopsi kebijakan (*Policy Adoption*) yaitu sebuah kebijakan diadopsi karena adanya dukungan mayoritas anggota dewan, adanya konsensus di antara pimpinan lembaga, atau adanya keputusan mayoritas.
- 4) Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*), yaitu kebijakan yang diadopsi dilakukan oleh badan/lembaga teknis pemerintah dengan memobilisasi sumber daya keuangan dan manusia untuk melaksanakan kebijakan.
- 5) Penilaian Kebijakan (*Policy Assessment*) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga audit pemerintahan dalam menentukan apakah kebijakan eksekutif, tindakan legislatif, dan keputusan pengadilan sesuai dengan persyaratan undang-undang dalam mewujudkan tujuannya.
- 6) Adaptasi kebijakan (*Policy Adaptation*) adalah Hasil audit dan evaluasi dari lembaga audit dilaporkan kepada lembaga yang bertanggung jawab untuk merumuskan, mengadopsi, dan menerapkan kebijakan bahwa peraturan yang ditulis dengan buruk, sumber daya yang tidak memadai, dan pelatihan yang tidak memadai memerlukan adaptasi kebijakan.

d. Aktor-aktor Kebijakan Publik

Menurut Leo Agustino (2017:28-48) aktor kebijakan publik terbagi menjadi dua kategori yaitu :

- 1) Aktor Negara

Aktor atau pejabat pembuat kebijakan adalah orang yang mempunyai wewenang yang sah untuk ikut serta dalam memformulasi hingga menetapkan sebuah kebijakan. Merujuk pada kehidupan nyata, aktor pembuat kebijakan adalah: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

2) Aktor Non-Negara

Ada beberapa aktor non-negara yang juga terlibat (secara langsung maupun tidak langsung) dalam proses kebijakan. keterlibatan atau partisipasi mereka dalam proses kebijakan terutama dalam memberikan masukan terhadap formulasi dan implementasi kebijakan. Beberapa aktor non-negara yang diidentifikasi sering berpartisipasi dalam proses kebijakan publik adalah: kelompok kepentingan dan kelompok penekan, partai politik, media massa, dan warga negara secara pribadi.

2. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi kebijakan

Menurut Kusumanegara dalam Ibrahim Kristofol Kendi (2024:1) implementasi diartikan sebagai output, yaitu melihat aktivitas dalam rangka mencapai tujuan program telah sesuai dengan arahan implementasi sebelumnya atau mengalami penyimpangan.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*), maupun sebagai hasil (Chazali H. Situmorang 2016:173-74).

Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2019:128) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Joko Pramono (2020:3) mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan

kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Pressman dalam H. Mukhtar Mas'ud, Bahtiar, Abd. Rahman (2022:13) menyatakan bahwa implementasi, adalah proses interaksi antara rumusan tujuan dan tindakan yang telah disesuaikan untuk mencapainya seperti halnya sebuah kemampuan untuk menempa urutan hubungan dalam rantai sebab akibat agar diperoleh hasil yang diketahui.

Menurut Joko Widodo dalam Rahayu Kusuma Dewi (2016:155) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

b. Teori Implementasi Kebijakan

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1) Teori George C. Edward Edward III

Teori George C. Edward III dalam Joko Pramono (2020:4-5) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2) Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Joko Pramono (2020:6) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program di dukung oleh sumberdaya yang memadai.

3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Joko Pramono (2020:7) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

4) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn dalam Joko Pramono (2020:8) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

c. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan

Menurut M. Irfan Islamy dalam Siti Marwiyah (2022:37) untuk mengefektifkan kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan membagi tahap implementasi dalam 2 bentuk yaitu:

- 1) *Self-executing*, yaitu bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan

terimplementasi dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu Negara terhadap kedaulatan Negara lain.

- 2) *Non self-executing*, yaitu bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

d. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn dalam Siti Marwiyah (2022:42-43), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber kebijakan
- 3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan
- 4) Karakteristik badan pelaksana
- 5) Kondisi ekonomi, sosial dan politik
- 6) Kecenderungan para pelaksana

Menurut Bambang Sunggono dalam Siti Marwiyah (2022:43-44), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

- 1) Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samanya isi kebijakan maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana dan penerapan prioritas, atau program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan kaitannya dengan sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

- 2) Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

- 3) Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4) Pembagian Potensi

Sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana.

3. Sampah

a. Pengertian Sampah

Sampah merupakan material sisa hasil aktivitas yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu dalam industri maupun rumah tangga. Dapat dikatakan sampah adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia setelah proses dan penggunaannya berakhir.

Menurut KBBI, sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Sedangkan menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

b. Jenis-jenis Sampah

1) Sampah Organik

Sampah organik adalah material yang dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme dan berasal dari makhluk hidup. Contoh: Sisa makanan, kulit buah, sayuran, dan limbah kebun seperti daun dan ranting. Pengelolaan: Sampah organik dapat diolah melalui proses komposting untuk menghasilkan pupuk alami yang bermanfaat bagi tanah.

2) Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah bahan yang tidak terurai secara alami dan biasanya berasal dari proses industri. Contoh: Plastik, kertas, logam, kaca, dan bahan lain yang terbuat dari bahan sintetis. Pengelolaan: Sampah anorganik dapat didaur ulang untuk membuat produk baru, mengurangi kebutuhan akan bahan baku baru dan mengurangi jumlah sampah di tempat pembuangan akhir.

3) Sampah Berbahaya (B3)

Sampah berbahaya adalah sampah yang mengandung bahan atau senyawa yang, jika tidak dikelola dengan benar, dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia atau lingkungan. Contoh: Baterai, lampu neon, bahan kimia rumah tangga, limbah medis, dan pestisida. Pengelolaan: Sampah B3 memerlukan penanganan khusus dan seringkali melibatkan pembuangan atau pengolahan yang aman untuk mencegah dampak negatifnya.

4) Sampah Khusus

Sampah khusus adalah kategori sampah yang memerlukan prosedur pengelolaan dan penanganan yang berbeda dari sampah

umum. Contoh: *E-waste* (sampah elektronik), limbah konstruksi, dan sampah dari produksi industri. Pengelolaan: Sampah khusus seringkali memerlukan teknologi dan metode pengelolaan yang khusus untuk memastikan bahwa prosesnya tidak merugikan lingkungan atau kesehatan.

c. Sumber-Sumber Sampah

1) Rumah Tangga

Sumber sampah terbesar dalam kehidupan sehari-hari berasal dari aktivitas rumah tangga, termasuk sisa makanan, kemasan, dan barang-barang rumah tangga yang tidak lagi digunakan.

Pengelolaan: Pengurangan penggunaan barang sekali pakai, komposting sisa makanan, dan pemilahan sampah untuk daur ulang adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengelola sampah rumah tangga.

2) Industri

Aktivitas industri menghasilkan berbagai jenis sampah, termasuk limbah produksi, bahan kemasan, dan produk yang sudah tidak digunakan.

Pengelolaan: Pengelolaan sampah industri melibatkan pengolahan limbah yang efisien, daur ulang bahanbahan industri, dan peminimalan limbah produksi.

3) Komersial

Sektor komersial, termasuk ritel, restoran, dan kantor, menghasilkan sampah yang terdiri dari kemasan produk, sisa makanan, dan barang-barang yang sudah tidak digunakan.

Pengelolaan: Pengelolaan sampah komersial seringkali melibatkan pemilahan untuk daur ulang, pengelolaan sisa makanan, dan implementasi kebijakan pengurangan sampah.

4) Konstruksi dan Renovasi

Proyek konstruksi dan renovasi menghasilkan sampah berupa material bangunan, sisasisa konstruksi, dan bahan yang tidak terpakai.

Pengelolaan: Pengelolaan sampah konstruksi melibatkan daur ulang material bangunan, pengurangan limbah selama proyek, dan pembuangan yang aman.

4. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Proses ini mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelohan, hingga pemrosesan akhir dengan prinsip reduce, reuse, recycle (3R)

Berdasarkan Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pengelolaan sampah di Indonesia dibagi menjadi dua, pertama yaitu pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan kedua yaitu pengelolaan sampah spesifik. Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab pemerintah, sedangkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah, pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Dalam hal ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki perannya masing-masing.

Kegiatan penanganan sampah meliputi : pemilahan sampah sesuai jenis, jumlah, dan/atau sifatnya; pengumpulan sampah ke tempat pengolahan residu; pengangkutan sampah dari tempat pengolahan residu ke TPA; pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan pemrosesan akhir dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

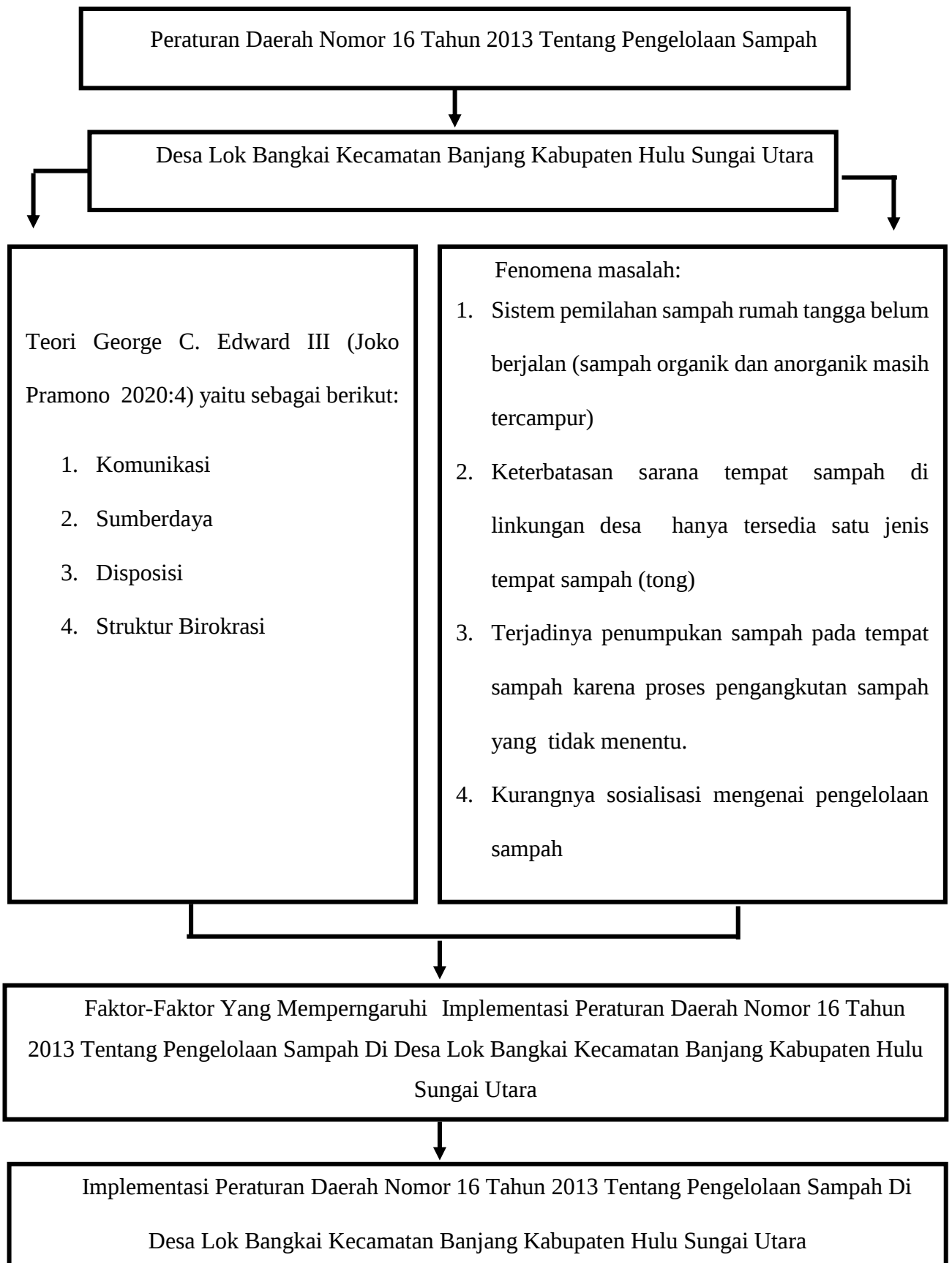
C. Kerangka Pemikiran

Menurut Agung Edy Wibowo (2021:67) Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Kerangka pemikiran menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan kepada pembaca mengapa mempunyai anggapan seperti Hipotesis. Kerangka berpikir disajikan dengan bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti dan serta keterkaitan antar variabel yang diteliti.

Setiap kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah, perlu dilandasi oleh kerangka pemikiran agar penelitian dan penulisan laporan tersusun secara sistematis. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran disusun berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, yang menjadi acuan dalam melihat bagaimana implementasi kebijakan tersebut di tingkat desa. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Lok Bangkai, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi fokus utama penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap pengelolaan sampah di masyarakat, sehingga dari itu penulis membuat kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan oleh penulis berlokasi di wilayah kabupaten Hulu Sungai Utara yang tepatnya dilakukan penelitian ini Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode pos 71416

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian kualitatif menurut Sugiyono dalam Harbani Pasalong (2020:161), adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Auerbach and Silverstein (dalam Sugiyono 2023:3) menyatakan bahwa, metode kualitatif adalah sebagai berikut . "*Qualitative research is research that involves analyzing and interpreting texts and interviews in order to discover meaningful patterns descriptive of a particular phenomenon*". Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis dan interpretasi teks dan hasil interview dengan tujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena.

Alat pengumpul data atau instrument penelitian dalam metode kualitatif adalah peneliti sendiri. Jadi peneliti merupakan instrument, dalam pengumpulan data peneliti harus terjun sendiri kelapangan. Teknik pengumpulan data yang sering digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Lok Bangkai.

Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan suatu keadaan, peristiwa, fenomena, atau variabel yang sedang berlangsung saat ini secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan kondisi sebenarnya. Penelitian ini tidak bermaksud untuk menguji hipotesis atau mencari hubungan sebab-akibat, melainkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai objek yang diteliti apa adanya. Dalam penelitian deskriptif, peneliti berfokus pada pengumpulan data yang relevan dan penyusunan informasi secara terperinci agar dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai situasi yang sedang diteliti.

Menurut Sembiring dkk. (2024:5) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa adanya perbandingan atau keterhubungan dengan variabel lain. Variabel yang menjadi objek penelitian bersifat mandiri, dan tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan dengan tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Selain itu, penelitian deskriptif juga bertujuan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala.

Menurut Harbani Pasolong (2020:75) Penelitian deskriptif (penggambaran), yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Menurut Subroto dalam Farida Nugrahani (2014:107) Data dalam penelitian pada dasarnya terdiri dari semua informasi atau bahan yang disediakan alam (dalam arti luas) yang harus dicari, dikumpulkan dan dipilih oleh peneliti. Data bisa terdapat pada segala sesuatu apa pun yang menjadi bidang dan sasaran penelitian. Dalam teknik ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yakni:

a) Data Primer

Data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara dan lain-lain.

Data primer adalah data pokok yang digali dari informan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Data primer pada penelitian ini merupakan informasi yang digali dari informan yang sudah dipilih, pemilihan informan tersebut dinilai dari wawasan dan pengetahuannya terhadap permasalahan-permasalahan pada tempat penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka.

Data sekunder merupakan data yang terhubung dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari data-data yang tersedia ditempat penelitian yakni Kantor Desa Lok Bangkai.

2. Sumber Data

a) Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan yang dipilih merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan informan/sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi social yang diteliti, (Sugiyono, 2017:119).

Dalam informan penelitian ini berjumlah 15 orang informan terdiri dari:

Tabel 1.3
Tabel Informan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1
2.	Sekretaris Desa	1
3.	Kasi Pelayanan & Kesejahteraan	1
4.	Plt Kabid Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup	1
5.	Staf Bidang Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup	1
6.	Petugas Sampah	2
7.	Masyarakat	8
Total		15

b) Dokumen/Dokumentasi

Dokumen adalah segala benda yang berbentuk barang, gambar ataupun tulisan sebagai bukti dan dapat memberikan keterangan yang penting dan absah. Dokumentasi adalah kumpulan dari dokumen-dokumen yang dapat memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengolahan dokumen secara sistematis serta menyebar luaskan kepada pemakai informasi tersebut.

E. Desain Operasional Penelitian

Menurut Imam Machali (2021:62) Definisi operasional variabel dimaksudkan untuk menjelaskan makna variabel yang sedang diteliti dalam perspektif peneliti berdasarkan eksplorasi teori-teori yang telah difahami. Definisi operasional variabel ini menjadi unsur penting yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel yang diteliti. Definisi operasional variabel mengatasi kesulitan melakukan pengukuran terhadap definisi konseptual, karena variabel yang hendak diukur masih berada dalam pikiran peneliti. Dalam definisi operasional variabel, peneliti

mengeluarkan konsep variabel yang ada dalam pikirannya kedalam definisi yang memungkinkan semua pengamat dapat melakukan pengamatan terhadap variabel dengan pemahaman yang sama karena dengan jelas menyatakan cara pengukuran dan alat yang diperlukan untuk melakukan pengukuran. Oleh karena itu, definisi operasional merupakan definisi yang dibuat berdasarkan definisi konseptual yang merupakan pernyataan mengenai variabel, cara pengukuran dan alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran.

Untuk lebih jelasnya mengenai desain operasional dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub variabel	Indikator
Teori George C. Edward III (Joko Pramono 2020:4) yaitu sebagai berikut:	Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan informasi 3. Konsistensi
	Sumberdaya	1. Ketersediaan sumber daya manusia 2. Ketersediaan sarana prasarana
	Disposisi	1. Komitmen Petugas 2. Tanggung jawab
	Struktur Birokrasi	1. Koordinasi 2. SOP

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data untuk kebutuhan suatu penelitian. Pengumpulan data yaitu merupakan suatu

langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang terkumpul digunakan dalam rangka analisis penelitian. Pengumpulan data harus menggunakan prosedur yang sistematis dan terstandar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Oleh karena selalu ada hubungan antara teknik pengumpulan data dengan masalah penelitian yang dijawab. Permasalahan penelitian tidak akan bisa terpecahkan jika teknik pengumpulan data yang digunakan kurang sesuai, dan menghasilkan data yang tidak dibutuhkan dalam pemecahan permasalahan penelitian tersebut.

Menurut Sugiyono (2023:104) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Berikut ini akan diuraikan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Batasan pengertian atau definisi observasi menurut Young dan Schmidt dalam Harbani Pasalong (2020:131), adalah sebagai pengamatan sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud adalah harus diberikan kepada unit kegiatan yang lebih besar atau lebih luas pada fenomena-fenomena khusus yang diamati terjadi.

2. Wawancara

Menurut Harbani Pasalong (2020:137) yaitu "kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *Interviewee*. Metode wawancara bisa dilakukan secara langsung

(*Personal interview*) maupun tidak langsung (*telephone* atau *mail interview*)".

3. Dokumentasi

Menurut sugiyono (2023:124) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang mendukung penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Menurut Bogdan dalam sugiyono (2023:130) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Menurut Miles and Huberman dalam sugiyono (2023:132-142) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Terdapat 3 Aktivitas dalam analisis data yaitu :

1. *Data reduction* (Reduksi Data)

Data diperoleh lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. *Data display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion drawing/verification*

Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid

dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

H. Uji Kredibilitas

Menurut Sugiyono (2017:252-263) Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan. melakukan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun sumber data yang baru. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keakraban (tidak ada jarak lagi, semakin terbuka, saling mempercayai) antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Selain itu perpanjangan pengamatan ini dilakukan. untuk mengecek kembali apakah data yang telah diberikan oleh sumber data selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila sudah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjang pengamatan dapat diakhiri.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkeselimbangan, dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Selain itu, penelitian dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Penelitian dapat memberikan diskripsi data yang akurat dan sistematis dan dapat diamati.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui dengan beberapa sumber, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dan triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan dengan teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

4. Mengadakan *member check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

5. Analisis kasus negatif

Analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

6. Menggunakan Bahan referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen-dokumen autentik sehingga data yang diperoleh dapat menjadi lebih dipercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2019). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. CV. PUSTAKA SETIA.
- Anirwan. (2025). *Konsep Teori Administrasi Publik dan Implementasi Kebijakan*. Penerbit Deepublish Digital.
- Anonim. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Jakarta.
- Anonim. (2013). *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah*. Amuntai.
- Anonim. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Jakarta.
- Budiman, F. H. (2024). *Implementasi Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus Dikecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru*. repository.uin-suska.ac.id.
- Dewi, R. K. (2016). *Studi Analisis Kebijakan*. CV PUSTAKA SETIA.
- Fitroni, T. I. (2018). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan Di Kabupaten Lamongan*. Repository.ub.ac.id.
- Hardani, H. A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- Igirisa, I. (2022). *KEBIJAKAN PUBLIK. Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Penerbit Tanah Air Beta.
- Kementerian Lingkungan Hidup. (2026, Maret). *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah*. Diambil kembali dari SIPSN-Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional: <https://sipsn.kemenvh.go.id/sipsn/public/data/capaian>
- Kendi, I. K. (2024). *Implementasi Kebijakan Publik. Aktor, Perangkat, Manajemen, dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua*. Penerbit: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Livia Novaradiska, V. K. (2026, Maret). *Apa itu Sampah?* Diambil kembali dari binus.ac.id: <https://binus.ac.id/bandung/2021/07/apa-itu-sampah/>

- Machali, I. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
- Marwiyah, S. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Repository Universitas Panca Marga .
- Mukhtar Mas'ud, B. A. (2022). *Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreng Kota Parepare*. Penerbit: Citra Multi Persada (CMP).
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.
- Pasolong, H. (2020). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. UNISRI Press.
- Siagian, H. F. (2026, Maret). *Pengelolaan Sampah di Indonesia*. Diambil kembali dari [djkn.kemenkeu.go.id: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lahat/baca-artikel/14891/Pengelolaan-Sampah-di-Indonesia.html#:~:text=Menurut%20KBBI%2C%20sampah%20adalah%20barang%20atau%20benda%20yang%20dibuang%20karena%20tidak%20terpakai%20lagi](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lahat/baca-artikel/14891/Pengelolaan-Sampah-di-Indonesia.html#:~:text=Menurut%20KBBI%2C%20sampah%20adalah%20barang%20atau%20benda%20yang%20dibuang%20karena%20tidak%20terpakai%20lagi)
- Siti Holimah, S. A. (2024). *Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan*. Penerbit: Cerdas Ulet Kreatif.
- Situmorang, C. H. (2016). *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Social Security Development Institute (SSDI).
- STIA Amuntai. (2022). *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi S1 Administrasi Publik*. Amuntai.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Tamaulina Br. Sembiring, I. M. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. CV Saba Jaya Publisher.
- Wibowo, A. E. (2021). *Metodologi Penelitian: Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah*. Penerbit Insania.